

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi membuat kehidupan manusia semakin mudah dalam beberapa aspek, salah satunya pada aspek perdagangan. Perdagangan internasional merupakan wujud modernisasi yang ada saat ini, dimana peluang perdagangan luas terutama dalam hal menjalin kerjasama bidang perekonomian antara negara satu dengan negara lain. Dunia telah memiliki beberapa organisasi perdagangan internasional yang menjadikan negara-negara didunia sebagai anggotanya, diantaranya *World Trade Organization* (WTO), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan sebagainya. Organisasi-organisasi perdagangan internasional tersebut mempermudah para anggotanya untuk bertemu di pasar internasional dan melakukan perdagangan dengan lebih mudah.

Dalam lingkup *The Association of Southeast Asian Nations* (selanjutnya disebut ASEAN) terdapat perjanjian yang membebaskan anggotanya untuk berdagang dengan bebas dalam lingkup ASEAN yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (yang selanjutnya disebut MEA). MEA diawali dari perjanjian bersama pada Konferensi Tingkat Tinggi (selanjutnya disebut KTT) yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia yang menghasilkan satu visi bersama negara-negara Asia Tenggara (*ASEAN Vision 2020*). Yaitu, menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang makmur dengan pembangunan serta pengembangan

ekonomi yang merata di tiap-tiap negara yang menjadi anggotanya. Pada KTT Malaysia menghasilkan konsensus baru, dimana dalam konsensus berisi tentang deklarasi cebu. Dengan ditandatanganinya Deklarasi Cebu maka keputusan konsensus dari tahun ke tahun menjadi satu langkah nyata untuk menjadikan ASEAN sebagai daerah perdagangan bebas yang meliputi seluruh komponen aktivitas ekonomi. Mulai dari barang, tenaga kerja (terampil), investasi, modal, sampai jasa.¹

Dengan lahirnya perjanjian tersebut secara tidak langsung menghadirkan pasar tunggal yang mempermudah perdagangan dalam tingkat ASEAN adanya pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN menjadikan aktivitas ekonomi bersifat bebas, baik dalam hal tenaga kerja (terdidik/terampil), bebas bea untuk aliran barang dan jasa dari kawasan regional ASEAN, serta keluar masuknya investasi dan aliran modal untuk negara-negara sekawasan. Tujuan lahirnya MEA adalah :²

- a. Iklim ekonomi kawasan menjadi lebih kompetitif.
- b. Usaha untuk pemerataan ekonomi dalam ruang lingkup negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.
- c. Integrasi ekonomi global dan pelosok untuk menjadi basis produksi serta pasar tunggal.

Pada aktivitas perdagangan tidak hanya berbicara tentang keuntungan, kerugian dan strategi bisnis saja yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha, tetapi juga tentang aspek hukum ketika terjadi sebuah sengketa. Jika terjadi

¹ <https://www.cermati.com>, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) inilah yang perlu diketahui, diakses pada tanggal 22 Desember 2017.

² Ibid.

sebuah sengketa perdagangan terdapat dua cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu penyelesaian sengketa dengan litigasi atau dengan non litigasi. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Para pelaku perdagangan cenderung memilih jalur penyelesaian sengketa secara non litigasi karena penyelesaian non litigasi yang cepat dan efisien. Selain itu Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia.

Pertama, dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan :

“(2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyelidikan dan penyidikan;
- b. penuntutan;
- c. pelaksanaan putusan;
- d. pemberian jasa hukum; dan
- e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.”

Terdapat dua macam cara penyelesaian sengketa yang selama ini diterapkan, yakni melalui litigasi dan non litigasi. Salah satu jalur non litigasi yakni proses arbitrase. Di Indonesia selaku negara hukum telah lama mengenal adanya proses arbitrase yang dapat dilihat berdasarkan sistim tata hukum mengenai arbitrase.³

Salah satu cara penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah melalui proses arbitrase. Kelebihan arbitrase dari sisi hukum acara terdapat fleksibilitas yang tetap berada dalam koridor hukum. Di sisi lain, arbiter yang memiliki

³ Yahya Harahap, 2001, *Arbitrase ditinjau dari Reglement Acara Perdata (Rv), peraturan Prosedur BANI, International Center for the Settlement of Investment Dispute (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA Nomor 1 Tahun 1990*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 1.

pengetahuan baik dari segi hukum maupun dari segi teknis, serta ketepatan waktu persidangan, menjadi kelebihan arbitrase itu sendiri sehingga sidang dapat berjalan secara efektif. Selain itu, kelanjutan hubungan bisnis antar para pihak juga diperhatikan. Bahkan tidak menutup kemungkinan hubungan baik dan kerja sama tetap dapat dilanjutkan.⁴

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) sehingga kerahasiaan para pihak terjamin, kemudian proses beracara lebih cepat dan efisien serta keputusan yang diberikan merupakan *win-win solution*. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁵

Pada bagian penjelasan umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak ;
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif ;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

⁴<http://www.hukumonline.com>, *Keuntungan Memilih Arbitrase daripada Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa*, di akses tanggal 22 Desember 2017.

⁵ Jessicha Tengar Pamolango, 2015, *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA*, Lex Administratum, Vol II, No 1, Hl 146.

Di Indonesia bahkan di dunia menyelesaikan sengketa secara non litigasi khususnya arbitrase menjadi yang istimewa oleh para pelaku perdagangan internasional. Di Indonesia arbitrase dilakukan oleh suatu lembaga yang dikenal bernama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dan di dunia internasional sendiri ada beberapa lembaga arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa perkara para pelaku perdagangan internasional, adapun lembaga-lembaga arbitrase internasional itu diantaranya *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*, *The International Centre For Settlement of Investment Dispute (ICSID)*, *WIPO Arbitration Centre*, *International Chamber of Commerce (ICC)*, *The London Court of International Arbitration (LCIA)*, *Kuala Lumpur Regional Center For Arbitration (KLRC)*, dan masih banyak lagi lembaga-lembaga arbitrase internasional yang ada di dunia. Jika para pelaku perdagangan internasional memiliki sengketa, maka para pihak mendapatkan kebebasan memilih domisili hukum melaksanakan arbitrase sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (yang selanjutnya BANI), BANI adalah pendiri Asia Pacific Regional Arbitration Group (APRAG) yang beranggotakan 42 lembaga arbitrase dari berbagai negara di Asia Pasifik., menurut data penyelesaian sengketa oleh pelaku usaha lewat lembaga arbitrase terus meningkat dari tahun ke tahun. Data BANI Arbitration Center menyebutkan, perkara yang terdaftar di BANI dalam kurun 2007-2016 sebanyak 728 perkara. Jumlah ini meningkat hingga 238% dibandingkan kurun 1997-2006 dengan

jumlah 215 perkara terdaftar. Sebelumnya, dalam kurun 1987-1996 terdapat 56 perkara terdaftar.⁶

Arbitrase menjadi pilihan pelaku usaha menuntaskan masalah tanpa melalui lembaga peradilan yang seringkali lama lantaran adanya proses banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Selain itu arbitrase memiliki prinsip-prinsip seperti efisien, *accessibility*, proteksi hak para pihak, *final and binding*, *fair and just*, dan sesuai dengan *sence of justice* dari masyarakat dengan demikian, akan lebih terjamin unsur “*deterrent*” dari si pelanggar, dan sengketa, akan dapat dicegah.⁷

Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Awards (New York Arbitration Convention)*, yang dikenal luas sebagai **Konvensi New York**, pada tanggal 5 Agustus 1981 dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 40 Tahun 1981 serta terdaftar secara resmi pada tanggal 7 Oktober 1981.

Negara Malaysia juga menggunakan arbitrase sebagai alternatif proses pengadilan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Lembaga arbitrase Malaysia yang berkedudukan di Kuala Lumpur dikenal dengan nama *Kuala Lumpur Regional Center For Arbitration* (KLRCA). KLRCA juga memacu pertumbuhan arbitrase internasional di Malaysia yang banyak menjadi pilihan para pelakuperdagangan internasional menyelesaikan perkaranya atau sengketanya.

⁶ <http://kabar24.bisnis.com>. 40 tahun berkiprah bani tangani 1.000. diakses pada tanggal 22 Desember 2017.

⁷ Munir Fuady, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 93-94.

KLRCa telah mengalami kenaikan beban kerja yang stabil setiap tahunnya. Sebelum tahun 2010, jumlah kasus yang terdaftar di KLRCa adalah antara sepuluh dan 20 kasus per tahun. Pada tahun 2012, KLRCa mendaftarkan 85 kasus baru; Pada tahun 2013, kasus tahunan yang diajukan meningkat menjadi 156 dan pada kuartal ketiga tahun 2014, pusat tersebut telah menerima 226 kasus. Menurut statistik KLRCa, hampir 20% kasus arbitrase pada tahun 2013 bersifat internasional, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.⁸

Jumlah penyelesaian sengketa untuk tahun 2016 di KLRCa adalah 522 kasus, dengan rincian sebagai berikut :⁹

- a. 61% dari semua arbitrase adalah perselisihan dari sektor konstruksi dan sektor terkait lainnya
- b. 60% dari semua mediasi adalah perselisihan dari sektor konstruksi dan sektor terkait
- c. 84% dari janji temu adalah untuk adjudikasi
- d. 50% peningkatan kasus ADNDR (*Asian Domain Name Dispute Resolution*) dibandingkan tahun 2015
- e. 71% dari semua masalah arbitrase yang diatur berdasarkan peraturan KRLCA (peraturan arbitrase KLRCa 2013 dan peraturan arbitrase cepat KLRCa)
- f. Total 416 janji yang dilakukan oleh KLRCa untuk semua perselisihan
- g. 134% peningkatan kasus adjudikasi dibandingkan tahun 2015

⁸ 2016 Annual report The Multi- Service Global Hub For ADR. Hal 15.

⁹ 2016 Annual report The Multi- Service Global Hub For ADR, op.cit, Hal 16.

- h. Total RM1,537,979,679.80 jumlah dana dalam perselisihan untuk adjudikasi
- i. Total USD295.470.992,84 dan RM468,209,113.39 jumlah dalam sengketa arbitrase.

Selain Negara Malaysia dan Indonesia ada Negara ASEAN lainnya, yang menjadi perhatian penulis yaitu Thailand. Pemerintah Thailand sangat menyadari pentingnya arbitrase sehingga pembentukan Pusat Arbitrase Thailand telah menjadi salah satu kebijakan penting dan perlu. Lembaga arbitrase Thailand adalah *Thailand Arbitration Center* (THAC). Pendirian THAC adalah persiapan proses penyelesaian perselisihan untuk Thailand, sebagai anggota ASEAN di B.E. 2558 (2015), agar bisa menjadi pusat arbitrase di ASEAN. (THAC) didirikan berdasarkan Undang-Undang Pusat Arbitrase B.E. 2550 (2007). Tujuan THAC adalah untuk mendukung dan mempromosikan sistem arbitrase internasional, untuk menjadi pusat arbitrase yang dikenal luas untuk menetapkan layanan independen mengenai arbitrase dan untuk memperbaiki pusat arbitrase di Thailand untuk memenuhi standar yang sama seperti lembaga arbitrase di negara lain.¹⁰

Arbitrase tetap merupakan pilihan resolusi perselisihan yang lazim di antara keduanya pihak yang bersengketa, dengan rata-rata tahunan sebesar 130 kasus baru, 112 kasus yang diselesaikan dan 315 kasus yang tertunda di akhir tahun, senilai lebih dari USD 1,2 miliar, dari tahun 2005 sampai 2014.¹¹

¹⁰ <http://thac.or.th>, *About THAC*, diakses pada tanggal 22 Desember 2017.

¹¹ <https://globalarbitrationnews.com>, *Arbitrase Thailand*, diakses pada tanggal 18 Januari 2018.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menjawab permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “***COMPARATIVE STUDY : PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SECARA ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DI INDONESIA, MALAYSIA DAN THAILAND***”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dalam era masyarakat ekonomi ASEAN di Indonesia, Malaysia dan Thailand ?
2. Bagaimana konsep ideal Arbitrase terkait tuntutan penyelesaian sengketa di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam era masyarakat ekonomi ASEAN di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam era masyarakat ekonomi ASEAN di Malaysia.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam era masyarakat ekonomi ASEAN di Thailand.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Memberikan tambahan wawasan bagi penulis dalam mengetahui *comparative study* terkait penyelesaian sengketa secara arbitrase dalam masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) di Indonesia, Malaysia dan Thailand, dan juga sebagai syarat penulisan tugas akhir dan menyelesaikan studi s-rata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Pemerintah di Negara ASEAN

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah di Negara ASEAN dalam melakukan peninjauan kembali regulasi penyelesaian arbitrase.

3. Bagi Lembaga Arbitrase

Untuk memajukan lembaga arbitrase sebagai pilihan para pelaku usaha yang bersengketa.

4. Bagi Pelaku Usaha

Untuk lebih meningkatkan kepercayaan kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan perkara perdagangan.

E. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan lahirnya tulisan ini dapat menambah ilmu wawasan *comparative study* terkait penyelesaian sengketa secara arbitrase dalam masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Dan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam merekonstruksi hukum arbitrase di Indonesia yakni Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait penyelesaian sengketa secara arbitrase dalam masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini sebagaimana yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Pada penelitian ini penulis menganalisa penyelesaian sengketa secara arbitrase dalam masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) Di Indonesia, Malaysia dan Thailand.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yakni melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat.¹³ Sedangkan dalam menerapkan metode pendekatan ini digunakan jenis pendekatan yakni pendekatan melalui *ststue approach* (pendekatan perundang - undangan), *comparative approach* (pendekatan perbandingan), *historocal approach* (pendekatan sejarah), *canseptual approach* (pendekatan konsep), dan *case approach* (pendekatan kasus).

2. Sumber Data

Dalam proses penyusunan penelitian hukum ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad adalah bahan hukum bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh

¹² Peter Mahmud Murzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. Hlm 29.

¹³ Sidik Sunaryo. *Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, Malang: UMM Press, 2012, hal 18.

lembaga yang berwenang untuk itu.¹⁴ Bahan – bahan hukum primer ini terdiri dari perundang – undangan, catatan- cattanan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- a) Undang-Undang tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- b) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- c) Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981.
- d) Malaysia Arbitration Rules 2017.
- e) Malaysian Arbitration Act.
- f) *Thailand Arbitration Center Rule on Arbitration B.E. 2558 (2015)*
- g) *Thailand Arbitration Center Rule on Arbitration Committee B.E. 2558 (2015).*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Buku – buku hukum, Jurnal – jurnal Hukum, Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media massa yang relevan dengan pokok bahasan penulisan hukum ini

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm 157.

Bahan hukum tersier adalah bahan – bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia, kamus, glossary dan bahan – bahan lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Dokumen

Merupakan pengumpulan data – data yang dimiliki oleh pihak yang terkait serta ditambah penelusuran Perundang – undangan dalam hal berkenaan dengan proses penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan – bahan kepustakaan dari berbagai literature atau buku – buku manapun jurnal.

c. Studi Internet

Dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan – bahan melalui internet atau website untuk melengkapi bahan hukum lainnya.

4. Teknis Analisa Bahan Hukum

Tahap analisa bahan hukum yaitu menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sedangkan analisa yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menganalisa permasalahan dengan konsep dan bahan hukum kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara/upaya lebih untuk menemukan aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan. Penelitian kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat

deskripsi, cenderung menggunakan analisa dan lebih menonjolkan proses makna.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis menyusun dalam 4 (empat) bab yang didalamnya terdiri dari sub bab agar mempermudah memahami penulisan hukum. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni : latar belakang yang menjelaskan akar dari permasalahan yang diangkat, rumusan masalah yang menjelaskan permasalahan, tujuan penulisan yang menjadi pencapaian dalam penulisan dan manfaat yang menjelaskan kegunaan bagi penulis, pemerintah dan masyarakat.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi deskripsi atau uraian dari teori yang digunakan atau yang melandasi dari penulisan penelitian hukum terkait permasalahan yang diangkat yaitu *Comparative Study* : Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase dalam Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Di Indonesia, Malaysia dan Thailand.

BAB III : PEMBAHASAN

Didalam pembahasan penulis akan menguraikan hasil penelitian berupa analisa atau kajian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan dikaitkan dengan teori – teori yang telah dijelaskan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab penutup yang menjadi sub bab yakni kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan berisikan inti dari hasil pembahasan yang didapatkan dalam penulian ini. Sedangkan saran berisikan rekomendasi dari penulis atas beberapa permasalahan yang diangkat.

